

Surat Kabar : Kompas  
Subyek : Konservasi

Edisi : 18 Januari 2012  
Halaman : 13

### KONSERVASI SATWA

#### Dana Sosial Perusahaan Kehutanan Diincar

Jakarta, Kompas - Kementerian Kehutanan mengusulkan pembentukan yayasan penyelamatan harimau. Lembaga itu akan menghimpun dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan populasi harimau sumatera yang kini diperkirakan 400 ekor.

Potensi dana tanggung jawab sosial perusahaan sektor kehutanan mencapai Rp 20 triliun. "Dana yang dihimpun agar dikelola para ahli konservasi dan lembaga swadaya pemerintah. Jangan pemerintah yang mengelola," kata Direktur Jenderal Penyelamatan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Darori pada lokakarya "Penggalangan Sumberdaya untuk Pelaksanaan Rencana Nasional Pemulihan Harimau", Selasa (17/1), di Jakarta.

Menurut Darori, penyelamatan harimau dan konservasi hutan tak bisa diserahkan kepada pemerintah yang anggarannya terbatas. Pemerintah hanya menjadi regulator atau penentu aturan main dalam upaya konservasi.

Dengan menghimpun dana seperti ini, lanjut Darori, pengelolaan konservasi akan lebih terarah dan fokus. Selama ini sejumlah perusahaan sudah bergerak dalam upaya konservasi harimau.

Perusahaan yang berbisnis memanfaatkan hutan bisa diajak terlibat. "Gugah mereka. Kalau dulu berbuat amal salah, sekarang agar berbuat amal saleh," tuturnya.

Anggaran pemerintah di Ditjen PHKA sekitar Rp 2 triliun per tahun atau lebih besar dibandingkan ditjen lain di Kemhut. Namun, dana tersebut dinilai sangat minim untuk mengelola 27 juta hektar areal konservasi di Indonesia.

Ia membandingkan dana konservasi di Malaysia yang mencapai 20 dollar AS per hektar. Di Indonesia sekitar 10 dollar AS.

#### Butuh koridor

Haryo T Wibisono dari HarimauKita mengatakan, pada prinsipnya ia mendukung gagasan keberadaan lembaga penyelamatan harimau. Namun, rencana itu harus dimatangkan dan dibicarakan agar lebih efektif.

Selain pendanaan berbentuk uang seperti yang digagas Kemhut, ia menilai perlu pula upaya perusahaan kehutanan untuk membantu konservasi harimau dengan penyediaan koridor yang menghubungkan kantong-kantong populasi harimau.

Di wilayah Aceh dan sekitarnya, menurut Haryo, sudah terdapat koridor-koridor yang tinggal dijaga petugas. Hanya saja untuk wilayah Riau dan Sumatera bagian Selatan lain perlu keterlibatan perusahaan perkebunan untuk membuat koridor.

"Koridor bisa berbentuk step stone, seperti sungai yang dijaga kanan-kirinya untuk harimau melintas. Tidak mengurangi areal perkebunan. Perkebunan yang tertata baik bisa menjadi tempat harimau melintas," ucapnya.

Sejauh ini, habitat harimau terus terdesak alih fungsi lahan dan minimnya mangsa. Perburuan juga mengancam. (ICH)